

Dari Meja Kultis ke Arena Profetis: Peran Politik Kaum Imam dan Tantangan Pendidikan Agama Kristen

Isidorus Lilijawa*

Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Kupang, Indonesia

*corresponding author: isidoruslilijawa@gmail.com

Disubmit: 02-08-2025; Direvisi: 14-10-2025; Disetujui: 14-10-2025

Abstract

The problems of poverty, injustice, social inequality, intergroup conflict, oppression, and corruption remain pressing social realities that demand the Church's moral and pastoral response. These issues cannot be resolved merely through political power but also require the involvement of the Church, particularly priests, in the politics of social concern. Priests possess cultic and prophetic functions that form the theological foundation for their engagement in public life. However, in pastoral practice, such political involvement often faces both internal and external challenges, especially due to the limited internalization of moral-political education within Christian Religious Education. Consequently, misunderstandings frequently arise regarding the true nature of priestly politics and the extent of their participation in public affairs. This study aims to explain priests' political attitudes in addressing various social problems by emphasizing their cultic and prophetic functions as moral and theological bases. The research employs a qualitative method with a library research approach through critical analysis of theological literature and Church documents. The findings indicate that priests who cultivate a cultic and prophetic spirituality can develop ethical, critical, and socially transformative political engagement. Therefore, Christian Religious Education must integrate the moral-political dimension into the formation of future priests so that they may embody a politics of social concern rooted in faith, justice, and the love of Christ, the Divine Teacher of Politics.

Keywords: *priest; politics; prophetic function; Christian Religious Education; social justice.*

Abstrak

Permasalahan kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan sosial, konflik antargolongan, penindasan, dan korupsi masih menjadi realitas sosial yang menuntut tanggapan moral dan pastoral dari Gereja. Situasi ini tidak dapat diatasi hanya melalui kekuasaan politik, melainkan juga melalui keterlibatan Gereja, khususnya para imam, dalam politik kepedulian sosial. Imam memiliki fungsi kultis dan profetik yang menjadi dasar teologis keterlibatan mereka dalam kehidupan publik. Namun, dalam praksis pastoral, keterlibatan politik para imam kerap menghadapi tantangan, baik secara internal maupun eksternal, terutama karena minimnya internalisasi pendidikan politik moral dalam Pendidikan Agama Kristen. Akibatnya, muncul kesalahpahaman mengenai hakikat politik imam dan batas keterlibatan mereka dalam urusan publik. Penelitian ini bertujuan menjelaskan sikap politik imam dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dengan menekankan fungsi kultis dan profetik sebagai landasan moral dan teologis. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui telaah kritis terhadap literatur teologi dan dokumen Gereja. Hasil kajian menunjukkan bahwa imam yang menumbuhkan spiritualitas kultis dan profetik mampu mengembangkan keterlibatan politik yang etis, kritis, dan berorientasi pada transformasi sosial. Karena itu, Pendidikan Agama Kristen perlu mengintegrasikan dimensi politik moral dalam formasi calon imam agar mereka mampu mewujudkan politik kepedulian sosial yang berlandaskan iman, keadilan, dan kasih Kristus sebagai Sang Guru Politik.

Kata Kunci: *imam; politik; fungsi profetik; Pendidikan Agama Kristen; keadilan sosial.*

Pendahuluan

Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk membangun sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterlibatan warga negara dapat diwujudkan dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik (Darung, 2021). Imam Katolik, sebagai bagian dari warga negara, juga terpanggil untuk mengambil peran aktif dalam bidang-bidang tersebut. Pada tahun 2016, Romo Rantinus Manalu, Pr., seorang imam dari Keuskupan Sibolga, mencalonkan diri sebagai kandidat bupati dalam Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah (<https://katoliknews.com>). Langkah politik sang imam memunculkan pro

dan kontra. Pihak yang mendukung menilai tindakan tersebut sebagai wujud nyata hak politik warga negara dan komitmen untuk memperbaiki tatanan sosial-politik masyarakat. Namun, pihak yang menentang melihatnya sebagai langkah yang kontraproduktif karena berpotensi menimbulkan polarisasi serta mengaburkan kredibilitas dan otentisitas kesaksian imam maupun institusi Gereja di tengah umat (Jehaut, 2020).

Fenomena serupa terjadi di Kabupaten Sikka, ketika Pastor Vande Raring, SVD, pada 23 Januari 2025 turun ke lapangan membela para pedagang kecil yang digusur dari Pasar Alok. Ia bersuara lantang menentang kebijakan portalisasi pasar yang merugikan pedagang kecil, namun tindakannya memicu reaksi negatif dari aparat pemerintah dan menimbulkan ketegangan (<https://regional.kompas.com>). Baik Pastor Rantinus maupun Pastor Vande menampilkan bentuk kepedulian sosial yang lahir dari keprihatinan terhadap realitas kemiskinan, penindasan, kekerasan, konflik antargolongan, ketidakadilan, dan korupsi yang mendera umat. Di tengah realitas semacam ini, eksistensi Gereja melalui peran para imam menjadi sorotan: apakah imam harus bersuara dan bertindak membela kaum kecil, atau tetap diam demi menjaga jarak dari politik praktis?

Secara teologis, Gereja memiliki tanggung jawab politik yang bersumber dari misi religiusnya. Gereja memang tidak memiliki kharisma politik secara langsung, tetapi berperan sebagai sarana Kerajaan Allah dalam sejarah dengan fokus pada pelayanan religius demi kemanusiaan. Dalam konteks itu, tanggung jawab sosial-politik Gereja diwujudkan melalui pembelaan terhadap martabat manusia dan pemajuan hak asasi manusia. Bentuk konkret dari tanggung jawab politik ini di zaman modern

adalah partisipasi aktif dalam memperjuangkan bonum commune, menegakkan keadilan sosial, dan memperkuat nilai-nilai demokrasi.

Namun, keterlibatan kaum imam dalam politik praktis mengandung potensi bahaya. Gereja Katolik sebagai lembaga rohani memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Bila pejabat Gereja terlibat secara langsung dalam politik praktis, dapat timbul kerancuan antara kepentingan religius dan kekuasaan politik. Hal ini berisiko memunculkan upaya pemaksaan pandangan agama tertentu dalam masyarakat yang plural serta menimbulkan konflik dan polarisasi sosial (J. Ohoiledjaan & S. S. Refo, 2024). Donatus Sermada (2023) dalam tulisannya “Hubungan Agama dan Negara di NKRI dalam Sorotan Filsafat Politik” menegaskan bahwa keterlibatan hierarki Gereja dalam politik praktis sering membawa perpecahan internal antara pihak yang pro dan kontra terhadap otoritas Gereja. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah para imam harus menjauh sepenuhnya dari dunia politik meskipun berhadapan dengan penderitaan dan ketidakadilan yang dialami umatnya?

Kitab Hukum Kanonik (KHK 281) menegaskan bahwa imam adalah promotor perdamaian. Ia dipanggil untuk memelihara perdamaian dan kerukunan di antara bangsa-bangsa (Hadiwikarta, 1991). Karena itu, imam dilarang terlibat dalam politik kekuasaan atau menjadi bagian dari partai politik tertentu, sebab hal itu akan menimbulkan keberpihakan yang mengaburkan netralitas Gereja. Namun, netralitas imam bukanlah sikap apatis terhadap politik, melainkan penolakan terhadap politik kekuasaan yang koruptif. Imam justru harus aktif dalam politik sebagai *politika caritatis*, politik kepedulian sosial yang berpijakan pada panggilan profetis untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan perdamaian.

Gereja tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ruang perjumpaan sosial dan kultural bagi masyarakat. Dalam konteks ini, para imam tidak cukup berhenti pada tugas-tugas kultis seperti pelayanan sakramen atau perayaan Ekaristi, melainkan perlu bergerak ke ranah profetis dengan menyuarakan kebenaran dan menentang ketidakadilan. Melalui peran profetis ini, Gereja dapat membentuk kesadaran umat akan tanggung jawab publik dan nilai-nilai demokrasi (Marfan F. T. & Supratikno, 2024).

Sayangnya, panggilan politik imam dari meja kultis menuju arena profetis kerap disalahpahami. Sebagian umat menganggap imam tidak boleh berpolitik karena politik dianggap kotor, sementara yang lain melihat keterlibatan imam dapat memecah Gereja. Menurut penulis, kesalahpahaman ini muncul akibat kurangnya internalisasi pendidikan politik dalam Pendidikan Agama Kristen. Minimnya refleksi teologis mengenai politik menyebabkan umat memiliki pemahaman yang sempit tentang tugas kultis dan profetis imam. Hal ini menjadi tantangan bagi Gereja untuk menanamkan pendidikan politik kristiani yang benar dalam formasi calon imam dan dalam pendidikan umat beriman.

Kajian ini bertujuan menjelaskan makna dan tanggung jawab politik kaum imam dari meja kultis ke arena profetis, sekaligus mengidentifikasi tantangan pendidikan kristiani dalam memahami peran politik imam. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi formasi calon imam agar mampu berpolitik secara profetis tanpa meninggalkan tugas kultisnya, serta membantu umat memahami bahwa politik moral dan sosial merupakan bagian integral dari panggilan Gereja untuk menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan teologis, sehingga memerlukan analisis mendalam terhadap teks, dokumen Gereja, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema keterlibatan politik kaum imam dan Pendidikan Agama Kristen. Sumber-sumber sekunder berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, dan karya akademik tentang politik moral dan pendidikan iman juga dijadikan bahan analisis untuk memperkaya perspektif teologis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (Miles & Huberman, 1992) yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengklasifikasikan informasi penting dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil kajian literatur secara sistematis dan tematis untuk menemukan relasi konseptual antara tugas kultis dan profetis imam dengan pendidikan politik kristiani. Tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, menghasilkan sintesis teologis yang memadukan hasil kajian dengan refleksi iman, sehingga muncul pemahaman baru tentang peran politik kaum imam dalam terang pendidikan iman dan kehidupan sosial Gereja. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian berjalan secara reflektif dan kritis, serta tetap berpijak pada dasar teologi Gereja Katolik yang kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Memahami Imam

Secara etimologis, kata imam yang digunakan dalam Gereja Katolik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris priest. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani presbuteros yang berarti “penatua.” Dalam tradisi Yudaisme, para penatua adalah tokoh awam yang dihormati dalam komunitas, tetapi tidak dianggap sebagai imam. Karena itu, istilah priest lebih tepat dipahami sebagai padanan dari kata Ibrani kohen, kata Yunani hiereus, dan kata Latin sacerdos (Dulles, 1992). Ketiga istilah ini menekankan peran seorang imam sebagai pribadi yang dikuduskan untuk mempersembahkan kurban dan bertindak sebagai perantara antara Allah dan umat-Nya.

Seiring perkembangan sejarah Gereja Katolik maupun Gereja-Gereja Timur, pemahaman tentang imam semakin mendalam. Imam dipandang sebagai pribadi yang menerima kuasa suci melalui Sakramen Imamat untuk menjalankan tugas-tugas ilahi. Melalui tahbisan ini, imam diutus untuk mewartakan Sabda Allah, menguduskan umat Allah, dan memimpin persekutuan umat beriman. Dengan demikian, imam bukan sekadar tokoh religius, melainkan pribadi yang dikuduskan secara khusus bagi pelayanan kepada Allah dan sesama. Ia menjadi jembatan antara Allah dan manusia, yang mempersembahkan doa serta kurban atas nama umat dan untuk keselamatan mereka.

Menurut Presbyterorum Ordinis (PO, 1992), para imam memiliki tiga tugas utama, yakni mewartakan Sabda Allah, melayani sakramen-sakramen, dan memimpin umat Allah. Ketiga tugas ini membentuk kesatuan yang utuh dalam pelayanan imamat Kristus dan tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Ketiganya saling meneguhkan dan

menemukan maknanya secara penuh dalam perayaan Ekaristi, yang menjadi sumber dan puncak seluruh hidup Gereja.

Tugas pertama imam adalah mewartakan Sabda Allah. Dalam tugas ini, imam dipanggil untuk menjadi pewarta dan saksi kebenaran Injil. Melalui pewartaan Sabda, ia menghimpun serta mempersatukan umat Allah. Sebagai rekan kerja para uskup, imam diutus untuk melanjutkan amanat Yesus sendiri: “Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk” (Mrk 16:15). Sabda yang diwartakan membangkitkan iman dalam hati orang yang belum percaya dan menumbuhkan iman dalam diri mereka yang telah percaya, sebagaimana ditegaskan Rasul Paulus: “Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh Sabda Kristus” (Rm 10:17). Karena itu, imam dipanggil untuk mewartakan Injil dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan umat dan situasi zaman, agar Sabda Allah sungguh hidup di tengah masyarakat (PO 4).

Tugas kedua imam adalah melayani sakramen-sakramen. Allah yang kudus berkenan melibatkan manusia dalam karya pengudusan-Nya, dan imam diangkat secara istimewa untuk mengambil bagian dalam imamat Kristus. Dalam perayaan liturgi, terutama dalam Ekaristi, imam bertindak in persona Christi, yakni mewakili Kristus yang terus-menerus mempersebahkan diri bagi keselamatan manusia. Melalui Sakramen Pembaptisan, imam mengantar seseorang menjadi anggota umat Allah; melalui Sakramen Tobat, ia mendamaikan pendosa dengan Allah dan Gereja; dan melalui Sakramen Pengurapan Orang Sakit, ia menghadirkan penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang menderita.

Puncak dari seluruh pelayanan imam terletak pada perayaan Ekaristi. Dalam Ekaristi, imam mempersebahkan korban Kristus secara

sakramental bagi keselamatan dunia. Semua sakramen dan karya kerasulan Gereja berpusat pada Ekaristi karena di dalamnya terkandung seluruh kekayaan rohani Gereja, yakni Kristus sendiri. Oleh sebab itu, Ekaristi disebut sumber dan puncak seluruh pewartaan Injil serta kehidupan iman umat beriman. Dari Ekaristi mengalir daya rohani yang menghidupkan seluruh pelayanan Gereja (PO 5).

Tugas ketiga imam adalah memimpin umat Allah. Dalam tugas ini, imam mengambil bagian dalam imamat Kristus sebagai Kepala dan Gembala. Ia bertugas menghimpun keluarga Allah dalam semangat persaudaraan yang sehati dan sejiwa serta menuntun mereka kepada Bapa dalam Roh Kudus. Untuk melaksanakan pelayanan ini, imam menerima karunia rohani yang memampukannya membangun dan meneguhkan umat. Sebagai gembala, imam dipanggil untuk meneladani Kristus yang lemah lembut dan penuh kasih terhadap semua orang. Rasul Paulus menegaskan: “Siap sedialah, entah baik atau tidak baik waktunya; nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran” (2Tim 4:2).

Walaupun imam memiliki kewajiban terhadap semua orang, ia secara istimewa bertanggung jawab terhadap kaum miskin, lemah, dan generasi muda. Tanggung jawab kegembalaannya tidak hanya menyentuh kehidupan pribadi umat, tetapi juga mencakup pembinaan jemaat Kristiani yang sejati. Persekutuan iman yang sejati ini berakar dan berpusat pada perayaan Ekaristi, yang menjadi sumber hidup jemaat. Karena itu, imam hendaknya mendorong umat agar aktif berpartisipasi dalam doa, liturgi, dan karya kasih. Melalui pelayanan imam, umat beriman dibimbing untuk hidup dalam kasih, saling membantu, dan memberi kesaksian tentang Kristus di tengah dunia (PO 6).

Dengan demikian, imam bukan sekadar pelaksana ritus liturgis, melainkan saksi dan pelayan Kristus yang hidup di tengah umat. Melalui pewartaan Sabda, pelayanan sakramen, dan karya kegembalaan, imam menghadirkan Kristus Sang Gembala di tengah dunia. Dalam dirinya, kasih dan karya penyelamatan Allah menjadi nyata, sehingga umat beriman dituntun untuk semakin mengenal, mengasihi, dan bersatu dengan Kristus, Sang Imam Agung yang menjadi sumber seluruh pelayanan Gereja.

Tugas Kultis dan Profetis Imam

Tugas seorang imam mencakup dua dimensi utama, yakni tugas kultis dan profetis, yang keduanya merupakan perwujudan dari partisipasi imam dalam imamat Kristus sendiri. Kedua tugas ini tidak dapat dipisahkan karena sama-sama berakar pada panggilan untuk menguduskan umat Allah dan mewartakan karya keselamatan Allah dalam dunia.

Secara khusus, tugas kultis seorang imam mencakup beberapa aspek penting dalam konteks pelayanan keagamaan. Secara umum, tugas ini berkaitan dengan pelaksanaan ibadah dan upacara keagamaan, termasuk mempersembahkan kurban, memimpin doa, dan memberkati umat atas nama Allah. Imam berperan sebagai perantara antara Allah dan manusia dalam konteks ibadah, serta menguduskan diri untuk melayani umat (Darmawijaya, 1991).

Dalam berbagai tradisi keagamaan, imam memiliki tugas utama untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah dan pengakuan akan kekuasaan-Nya. Dalam tradisi Katolik, tugas ini mencapai puncaknya dalam perayaan Ekaristi, yaitu peringatan kurban Yesus Kristus di kayu salib. Selain melayani sakramen, imam juga bertanggung jawab

memimpin umat dalam doa dan liturgi, termasuk Misa Kudus, ibadat harian, serta upacara keagamaan lainnya. Mereka diutus untuk menjaga kekhidmatan dan kesucian ibadah agar umat semakin didekatkan pada Allah (PO 7).

Penahbisan imam menjadi tanda pengabdian penuh kepada Tuhan dan keselamatan umat manusia. Imam dipanggil untuk menguduskan diri dan menjadi teladan dalam iman serta kehidupan. Dengan demikian, tugas kultis imam tidak hanya menjaga kelangsungan ibadah, tetapi juga menjadi sarana pembimbingan rohani bagi umat dalam membangun relasi yang mendalam dengan Tuhan.

Sementara itu, fungsi profetis kaum imam mendapat perhatian istimewa dalam dokumen Konsili Vatikan II. Menurut Paus Paulus VI, “Dalam Konsili, Gereja mau melihat dan merenungkan siapakah Gereja dan apa tugasnya dalam dunia yang semakin berubah.” Perkembangan dunia modern menuntut para imam untuk tidak hanya berfokus pada altar, tetapi juga hadir secara profetis di tengah masyarakat, mewartakan Sabda Allah melalui kesaksian hidup dan pelayanan (Pastores Dabo Vobis, 1992).

Konsili Vatikan II dalam Konstitusi tentang Liturgi menegaskan bahwa liturgi dan pewartaan Injil tidak boleh dipisahkan. Ritus sakramen-sakramen harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan dengan pewartaan Sabda Allah. “Walaupun liturgi kudus pada tempat yang pertama adalah penghormatan terhadap keagungan ilahi, namun liturgi kudus juga mengandung pendidikan umat yang berbobot, karena di dalam liturgi Allah berbicara kepada umat-Nya; Kristus masih mewartakan Injil-Nya” (SC, 1992).

Dengan demikian, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa fungsi paling luhur dari tugas imam memang terletak pada dimensi kultisnya,

terutama di altar. Namun fungsi itu tidak dapat dilepaskan dari dimensi profetisnya sebagai pelayan Sabda. Keduanya mesti dijalankan secara seimbang dan saling melengkapi, sebab pewartaan Sabda menemukan kepenuhannya dalam perayaan liturgi, dan liturgi memperoleh maknanya melalui pewartaan Sabda yang dihidupi.

Gambaran ideal tentang imam sebagaimana ditampilkan Konsili Vatikan II adalah imam yang mencerminkan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, yang mengajar, menguduskan, dan mengurbankan hidup-Nya bagi umat. Dalam kesatuan yang mesra dengan Kristus, para imam diutus untuk menjadi gembala, nabi, dan imam agung bagi umat Allah.

Dalam konteks ini, Michael J. Buckley dalam T. P. Rausch menulis bahwa “Imamat profetis adalah imamat yang mempunyai perhatian untuk mewartakan Sabda Allah dalam berbagai cara yang dapat didengar, dipahami, dan diinkarnasi ke dalam kehidupan sosial umat manusia, suatu imamat yang berbicara mengenai pengalaman keagamaan umat manusia” (Rausch, 1992). Pernyataan ini menegaskan bahwa fungsi profetis imam tidak berhenti pada pewartaan verbal, tetapi juga menuntut keterlibatan nyata dalam situasi sosial masyarakat, bahkan di wilayah-wilayah yang diliputi penindasan dan penderitaan.

Dengan demikian, baik tugas kultis maupun profetis merupakan dua sisi yang tak terpisahkan dari pelayanan imamat. Imam dipanggil untuk menghadirkan Kristus dalam liturgi dan dalam kehidupan sosial umat manusia, agar karya keselamatan Allah sungguh dialami dalam seluruh dimensi kehidupan.

Memaknai Politik

Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani *ta politika*, yang berarti hal-hal atau urusan yang berkaitan dengan *polis* (kota). Pada masa itu, polis merupakan bentuk pemerintahan negara-kota yang menjadi pusat kehidupan sosial dan politik masyarakat Yunani. Karena itu, politik dalam konteks awalnya merujuk pada segala sesuatu yang menyangkut pengelolaan dan tata kehidupan warga dalam suatu polis. Plato menamakan bukunya tentang negara ideal dengan *Politeia*, sedangkan Socrates menggunakan istilah politikhon untuk menunjuk pada hal-hal kenegaraan. Istilah ini sering disandingkan dengan kata *techne*, yang berarti seni atau keterampilan. Dengan demikian, secara etimologis, politik dapat dipahami sebagai seni atau teknik mengelola kehidupan bersama dalam masyarakat, yakni kemampuan mengubah kemungkinan menjadi kenyataan, atau mengolah potensi menjadi tindakan yang efektif (Heuken, 1994).

Dalam tradisi pemikiran Yunani, politik dipandang sebagai seni mengatur negara dan mengelola kehidupan publik demi kebaikan bersama. Pandangan ini kemudian berkembang dalam berbagai pemikiran modern. Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah cara atau usaha untuk memengaruhi sistem dan kebijakan publik dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang baik bagi Masyarakat (Budiardjo, 2018). Dalam pengertian ini, politik tidak hanya menyangkut kekuasaan, tetapi juga seni menata kehidupan sosial agar manusia dapat hidup bersama secara adil dan tertib.

Politik pada hakikatnya berbicara tentang hal-hal yang menyangkut kepentingan umum (*pro bono publico*), yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam pengertian

yang luas, terdapat dua unsur penting yang menandai makna politik. Pertama, politik selalu bersifat aktif dan dinamis, yakni suatu kegiatan, keterlibatan, atau tindakan nyata untuk menangani dan mengubah kenyataan sosial yang dihadapi. Politik bukan sekadar teori, maksud, atau sikap, melainkan praksis konkret dalam kehidupan bersama. Kedua, jangkauan tindakan politik tidak terbatas pada lingkup kecil seperti keluarga, tetapi mencakup masyarakat dalam arti luas: seluruh daerah, negara, atau bagian penting dari kehidupan publik suatu bangsa.

Dengan demikian, politik dapat dipahami sebagai seni sekaligus tanggung jawab dalam mengelola kehidupan bersama. Ia tidak sekadar berurusan dengan kekuasaan, tetapi juga dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan umum. Politik yang sejati selalu diarahkan untuk membangun tata kehidupan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup bermartabat di tengah komunitasnya.

Tujuan Keterlibatan Politis Kaum Imam

Keterlibatan politis seorang imam pada dasarnya merupakan bentuk keterlibatan profetis. Hal ini berakar pada hakikat panggilan imamat yang berhubungan erat dengan tugas kenabian, yaitu menyuarakan ideal keadilan yang menjadi impian Allah bagi umat-Nya. Kehadiran imam di tengah masyarakat bukan sekadar kehadiran seremonial, melainkan kehadiran yang kritis dan transformatif. Seperti para nabi dalam Kitab Suci, imam dipanggil untuk menegur segala bentuk kebobrokan moral, ketidakadilan sosial, dan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan oleh penguasa maupun masyarakat. Karena itu, tujuan utama keterlibatan politis seorang imam adalah mengembalikan martabat manusia yang dinodai oleh

struktur dosa dan penindasan. Keluhuran martabat manusia menjadi orientasi utama seluruh aktivitas politis kaum imam.

Dalam konteks ini, Gereja memainkan peran penting sebagai pembela hak dan martabat setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau agama. Gereja menegaskan bahwa kebebasan, kesetaraan, dan keadilan merupakan nilai-nilai universal yang sejalan dengan ajaran Kristus. Melalui peran profetisnya, Gereja juga terlibat secara aktif dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, khususnya bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Dalam praktiknya, Gereja memberikan perhatian besar kepada kelompok-kelompok rentan seperti pengungsi, korban konflik, anak-anak terlantar, serta mereka yang mengalami diskriminasi sosial atau ekonomi. Dalam semangat kasih Kristus, Gereja mendorong sikap penerimaan terhadap keberagaman dan mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan (Zai & Bambangan, 2025).

Selain membela martabat manusia, keterlibatan politik kaum imam juga bertujuan untuk memberdayakan dan mendidik umat agar memiliki kesadaran politik yang benar. Gereja, melalui para imam, berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis umat beriman untuk menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab dan bermartabat (Melianti, 2022). Pendidikan politik yang diberikan Gereja bukan dimaksudkan untuk mendukung kepentingan partai tertentu, melainkan untuk membentuk warga negara yang beriman dan cerdas secara politik. Para imam harus memahami politik dan kepemimpinan dalam terang nilai-nilai Injili, sehingga dapat membimbing umat membangun pola pikir yang benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Lado, 2024).

Lebih jauh, pendidikan politik di Gereja memiliki relevansi yang signifikan, terutama dalam menghadapi momentum politik seperti pemilihan umum. Pengetahuan dan keterlibatan umat yang memadai dapat membentuk pemilih yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Gereja dapat menjadi sumber informasi yang objektif dan terpercaya bagi umatnya, dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti forum diskusi, seminar, dan penyuluhan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, umat dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang program dan platform para kandidat, isu-isu sosial yang krusial, serta mekanisme dan etika dalam proses demokrasi (Firmanto & Abadi, 2024).

Dengan demikian, keterlibatan politis kaum imam bukanlah upaya perebutan kekuasaan, melainkan perwujudan tanggung jawab profetis dalam memperjuangkan nilai-nilai Injil di ruang publik. Imam hadir sebagai suara kenabian yang menyerukan keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan, sekaligus sebagai pendidik umat agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik secara bijaksana dan etis demi terwujudnya tata kehidupan bersama yang bermartabat dan berkeadilan.

Peran Politik Imam dan Tantangan PAK

Pendidikan Agama Kristen (PAK) berakar pada amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28:19–20. Penyelenggaranya merupakan upaya pendewasaan iman para murid melalui baptisan dan pengajaran. PAK adalah proses pengajaran dan pembelajaran yang bersumber pada Alkitab, berpusat pada Kristus, dan bergantung pada bimbingan Roh Kudus. Tujuannya adalah menuntun setiap pribadi menuju pengenalan dan pengalaman akan rencana serta kehendak Allah melalui Kristus dalam seluruh aspek kehidupan, sekaligus mempersiapkan mereka untuk

pelayanan yang efektif. Dengan demikian, PAK berpusat pada Kristus Sang Guru Agung yang memerintahkan agar para murid dimatangkan dalam iman dan perbuatan (Kristanto, 2008).

PAK tidak terbatas pada ranah pendidikan formal di sekolah, tetapi juga menyentuh kehidupan umat secara luas. Dalam kaitannya dengan peran politik kaum imam, PAK memiliki tanggung jawab penting untuk membuka wawasan, mengubah paradigma berpikir, dan membangun kesadaran umat tentang tanggung jawab politik imam sebagai bagian dari panggilan kenabian Gereja. Melalui PAK, umat dibimbing memahami bahwa iman Kristen juga harus diwujudkan dalam kehidupan sosial-politik. Karena itu, PAK menjadi sarana aktualisasi pendidikan politik yang baik dan benar, yang berakar pada nilai-nilai Injili.

Namun demikian, penerapan nilai-nilai politik dalam PAK menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah pemahaman yang keliru tentang peran politik kaum imam. Banyak umat, bahkan sebagian imam sendiri, memiliki pandangan yang sempit atau salah kaprah tentang politik. Hal ini terjadi karena minimnya pendidikan politik yang dikolaborasikan dalam kurikulum PAK. Akibatnya, muncul ketegangan teologis dan praktis dalam memaknai keterlibatan politik imam di tengah masyarakat. Tantangan-tantangan ini dapat dikategorikan menjadi dua: tantangan internal dan tantangan eksternal.

Secara internal, hambatan utama datang dari sikap keengganan imam sendiri untuk terlibat dalam persoalan politik. Keengganan ini sering disebabkan oleh apatisme terhadap isu-isu sosial dan penderitaan rakyat kecil. Banyak imam memandang politik sebagai sesuatu yang kotor, manipulatif, dan bertentangan dengan kesucian hidup rohani. Sikap negatif ini, sebagaimana dikemukakan Rungkat, bersumber dari kurangnya

pengajaran Gereja yang seimbang serta pengalaman nyata politik yang sering kali diwarnai oleh praktik korup dan tidak etis (Rungkat, 2010).

Selain itu, muncul pula ketegangan antara fungsi profetis dan kultis kaum imam. Keterlibatan politik menuntut keseimbangan antara tugas pewartaan dan pelayanan liturgis. Dalam praktiknya, sebagian umat menganggap imam hanya sebagai spesialis dalam bidang kultis yang harus netral dan bebas dari keberpihakan politik. Mereka khawatir keterlibatan sosial-politik imam dapat mengganggu kesatuan umat. Pandangan ini, sebagaimana dijelaskan Paulus Budi Kleden, sering kali menempatkan aspek kultis secara berlebihan sehingga mengaburkan dimensi profetis panggilan imam (Kleden, 2019).

Sementara itu, tantangan eksternal datang dari tekanan kekuasaan dan dinamika politik identitas. Imam yang bersikap kritis terhadap kebijakan atau praktik penguasa sering menghadapi intimidasi, ancaman, bahkan upaya pembungkaman. Di sisi lain, keterlibatan politik imam yang tidak terkelola dengan baik dapat menimbulkan persepsi keberpihakan yang berujung pada perpecahan umat. Lestari mengingatkan bahwa politik identitas di Indonesia sering melahirkan diskriminasi, ketidakadilan, dan fragmentasi sosial, yang juga dapat menjebak Gereja bila tidak berhati-hati (Lestari, 2018).

Bahaya lain muncul ketika pemimpin Gereja sendiri bersikap ambigu. Seruan moral yang disampaikan terkadang tidak murni demi kebaikan bersama, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Bataona dan Bajari menyoroti praktik manipulatif ini, di mana relasi antara Gereja dan rezim kekuasaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, termasuk dalam perburuan suara (Bataona & Bajari 2017).

Meski demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, prinsip dasar tetaplah sama: Gereja harus hadir untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan, serta menolak segala bentuk penindasan dan kekerasan terhadap martabat manusia. Gereja harus menjadi rumah aman bagi yang menderita. Firman Tuhan dalam Yeremia 29:7 menegaskan panggilan itu: “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu” (Latumahina, 2021).

PAK pada akhirnya bertujuan menuntun peserta didik untuk memahami iman Kristen secara utuh—bukan hanya sebagai doktrin, tetapi sebagai cara hidup yang nyata dalam masyarakat. Groome menekankan bahwa PAK membentuk peserta didik menjadi pembuat sejarah kehidupan yang memahami Kerajaan Allah secara kognitif, afektif, dan konatif (Groome, 1980). Tan Giok Lie menegaskan pentingnya pemahaman konteks sosial dan politik bagi pendidik Kristen di Indonesia agar pembinaan iman umat menjadi relevan dan efektif (Lie, 2013). Sementara itu, Phillips menyoroti perlunya pengenalan terhadap pendekatan pendidikan politik yang berakar pada iman Kristen dan disesuaikan dengan konteks hidup peserta didik (Phillips, 2012).

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa materi pendidikan politik yang perlu diintegrasikan dalam PAK terkait peran politik imam. Pertama, imam juga adalah makhluk politik (*zoon politikon*). Mereka memiliki hak untuk memilih meskipun tidak diperkenankan menduduki jabatan politik, sebagaimana diatur dalam Kanon 287 §1. Kedua, walau tidak dapat terlibat dalam politik kekuasaan secara langsung, imam dapat menyalurkan semangat kepemimpinan melalui politik kepedulian sosial—

politik yang berlandaskan pada kemanusiaan, solidaritas, dan keadilan (Mangunwijaya, 1997).

Ketiga, imam memiliki dua tugas utama: kultis dan profetis. Tugas kultis yang berkaitan dengan pelayanan sakramen, ibadah, dan perayaan Ekaristi tidak meniadakan tugas profetis untuk menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan, dan mengoreksi kebobrokan sosial. Kedua dimensi ini saling melengkapi dan membentuk integritas pelayanan imam. Keempat, larangan berpolitik praktis (KHK 287) tidak dimaksudkan untuk membungkam peran sosial imam, melainkan sebagai perlindungan yuridis agar identitas spiritual imam tetap terjaga dan misi perutusannya tetap fokus (Kleden, 2019).

Kelima, Gereja perlu terus mendorong pendidikan politik bagi umat, khususnya kaum muda. Politik sejatinya adalah sarana luhur untuk memperjuangkan bonum commune (kebaikan bersama), bukan arena yang najis. Yang membuat politik kotor adalah perilaku manusia yang menyalahgunakannya. Karena itu, Gereja harus mengajarkan politik sebagai panggilan moral untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan damai. Keenam, para imam memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan kesadaran politik yang sehat melalui diskusi, seminar, tulisan, dan pendampingan umat. Mereka juga perlu mendorong kaum muda Katolik yang potensial untuk berkiprah dalam politik praktis sebagai kader Gereja yang membawa nilai-nilai iman ke tengah masyarakat.

Kesimpulan

Gereja melalui para imam hadir untuk berpihak kepada yang lemah, yang tidak berdaya, yang miskin, dan yang terpinggirkan. Jika Gereja tidak memiliki keperpihakan kepada yang lemah, maka kehadiran Gereja tidak

memiliki makna. Kemiskinan harus ditanggulangi supaya manusia mendapatkan keadilan, harkat dan martabatnya sebagai manusia. Di tengah realitas sosial semacam ini, para imam harus terlibat untuk menguraikan berbagai masalah tersebut hingga menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik.

Terlibatnya para imam dalam urusan politik adalah implementasi dari tugas profetisnya, yang tentu tidak terlepas dari internalisasi tugas kultis. Kehadiran imam dalam meja kultis dan eksistensi imam di arena profetis adalah satu-kesatuan yang tidak terpisahkan. Imam yang kultis adalah imam yang profetik dan sebaliknya. Kedua peran ini dijalankan dalam pendulum keseimbangan yang kritis dan kreatif.

Pendidikan politik dalam PAK penting untuk membekali umat Kristen dengan pemahaman tentang bagaimana iman Kristen dapat diterapkan dalam konteks politik dan kehidupan bermasyarakat. Tujuannya adalah agar umat Kristen dapat berperan aktif dan bertanggung jawab dalam proses politik, serta menjadi agen perubahan yang positif di masyarakat. Pendidikan politik dalam PAK sangat penting agar peserta didik atau umat pada umumnya dapat memahami secara benar peran politik kaum imam dalam tata tugas kultis hingga profetisnya.

Implementasi politik terlibat atau politik kepedulian sosial kaum imam harus berdasarkan kepentingan Gereja dan umat Allah, bukan karena dorongan interese pribadi atau kelompok kepentingan bahkan politik identitas. Maka, kaum imam adalah agen politik Gereja, bukan kaki tangan atau juru bicara kepentingan partai politik atau politisi-politis tertentu. Jika ini yang terjadi, maka itu salah dan tidak sesuai semangat Injil serta ajaran sosial Gereja. Tulisan ini dapat menjadi referensi bagi para mahasiswa Pendidikan Agama Kristen maupun umat pada umumnya untuk

memahami peran politik kaum imam secara benar. Para imam dalam merefleksikan peran politiknya bisa menjadikan tulisan ini sebagai referensi alternatif.

Referensi

- Bataona, M. R. and Bajari, A. (2017). Power Relations and Symbols of Political Economy of the Church in Local Political Contestation of East Nusa. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2).
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (7th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Darung, A. & Y. (2021). Keterlibatan Gereja Katolik Mendukung Moderasi Beragama Berorientasi Pada Komitmen Kebangsaan. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 5(2).
- Dulles, A. (1992) 'Model-Model Imamat Pelayanan', dalam Georg Kirchberger (Ed.), *Gereja dalam Perubahan*. Ende: Nusa Indah.
- Firmanto, F., dan Abadi, W. R. (2024). Peran Pendidikan Politik Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pemilihan Presiden 2024. *Mis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 23.
- Groome, Thomas H. 1980. *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Hadiwikarta, J. (1991). *Kitab Hukum Kanonik*. Sekretariat KWI, Obor.
- Heuken, A. (1994). *Ensiklopedi Gereja*. Cipta Loka Caraka.
- Ohoiledjaan, J. & S. S. Refo. (2024). Bahaya Keterlibatan Hierarki Gereja dalam Politik Praktis. *Seri Mitra Refleksi Ilmiah*, 3(1).
- Jehaut, R. (2020). Antara Larangan dan Pengecualian: Ihwal Partisipasi Aktif Imam dalam Partai Politik dan dalam Jabatan Publik. *Jurnal Ledalero*, 19(2).
- Kleden, P. B. (2019). Berfilsafat dan Berteologi di Indonesia. *Jurnal Ledalero*, 18(2), 164.
- Kristanto, P.L. (2008). *Prinsip & Praktik Pendidikan Agama Kristen*. Yogyakarta: Andi, 4.

- Lado, G. A. (2024). Pendidikan Gereja Untuk Meningkatkan Kemampuan Edukasi Jemaat Dalam Berpolitik. *Inculco Journal of Christian Education*, 4(1), 88–106.
- Latumahina, V. (2021). Peran Gereja dalam Menggapai Kemiskinan. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(1).
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama. *Journal of Politics and Policy*, 1(1).
- Lie, Tan Giok. 2013. The Context and Challenges of the Church's Educational Ministry in Indonesia. *Christian Education Journal*, 3(10), 233-240.
- Mangunwijaya, Y. B. (1997). *Politik Hati Nurani*. Gafiasri Mukti.
- Marfan F.T. dan Supratikno, A. (2024). Peran Politik Gereja dalam Tahun Politik 2024: Studi Kasus Serpong. *TE DEUM Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*, 13(2), 227–248.
- Melianti, S. (2022). Pendidikan Kristiani dalam Membentuk Kesadaran Politik: Upaya Mendorong Partisipasi Politik dalam Prinsip Etis Teologis. *Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 3(2).
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indoensia Press, 16.
- "Pastores Dabo Vobis", (1992) dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Departemen DokPen KWI.
- Phillips, Elizabeth. 2012. Approaching the Approaches: Teaching Political Theology through and within Situatedness. *Political Theology*, 13 (6), 674-686
- "Presbyterium Ordinis", (1992) dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Departemen DokPen KWI.
- Rausch, T.P (1992). *Priesthood Today: An Appraisal* (Paulist Press: New York and Mahwah, New Jersey), 85.
- Riyanto, A. E. (2015). *Berfilsafat Politik*. Kanisius.
- Rungkat, J. (2010). *Theologia Politik Yesus*. Batu: Departemen Literatur YPPII, v-vi.
- "Sacrosanctum Concilium", 1992 dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Departemen DokPen KWI.

- Sermada, D. (2023). Hubungan Antara Agama dan Negara Di NKRI dalam Sorotan Filsafat Politik. *Jurnal Studia Philosophica Theologica*, 33(32).
- St. Darmawijaya (1991). *Citra Imam: Satriya Pinandita* (Yogyakarta: Kanisius, hlm. 85-86.
- Zai, I.P dan Bambangan, M. (2025). Gereja dalam Menghadapi Tantangan Sosial, Politik, dan Budaya dari Abad ke Abad, *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen dan Katolik*. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 3(1), 64.
- <https://katoliknews.com/2016/06/30/pastor-rantinus-resmi-deklarasikan-diri-sebagai-calon-bupati-tapanuli-tengah/>
- <https://regional.kompas.com/read/2025/01/23/190746078/soal-portal-pasar-alok-kadis-perdagangan-nyaris-adu-jotos-dengan-pemuka>